

OPINI

Mandiri Tanpa Subsidi

HARI ini, rencananya pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan BBM untuk jenis premium diperkirakan naik sebesar Rp 2000, sedangkan solar naik Rp 1000. Kenaikan ini akan diimbangi dengan pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin senilai Rp 27,9 triliun. Paket ini terdiri dari bantuan langsung tunai sementara (BLSM) sebesar Rp 93,2 triliun, untuk percepatan perlindungan sosial sebesar Rp 12,6 triliun, dan untuk program infrastruktur dasar sebesar Rp 6 triliun. Untuk program perlindungan sosial terdiri dari program bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan Rp 700 miliar, subsidi pangan atau beras untuk rakyat miskin Rp 4,3 triliun.

Langkah pemerintah ini memang tidak populer. Meski alokasi untuk masyarakat miskin cukup besar, namun hal ini tidak menyurutkan sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan penolakan. Sejumlah elemen seperti kaum buruh, mahasiswa, dan kelompok lainnya diperkirakan turun ke jalan untuk melakukan penolakan tersebut. Bahkan di beberapa kota, aksi penolakan ini mengarah pada tindakan anarkis.

Meski begitu, langkah pemerintah tidak akan surut dengan aksi tersebut. Langkah pemerintah ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan menjaga stabilitas fiskal. Dengan mengurangi subsidi BBM, pemerintah bisa mengalokasikan subsidi ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Pengalihan alokasi itu sebenarnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh yang sederhana adalah pada tahun 2005 lalu. Saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah bisa mengalokasikannya ke anggaran pendidikan. Tercatat dari tahun 2005 mengalami kenaikan anggaran di pendidikan.

Di tahun 2005, alokasi sebesar Rp 74,4 triliun, lalu tahun 2006 menjadi Rp 119,5 triliun. Meningkat lagi di tahun 2007 sebesar Rp 136,6 triliun dan tahun 2008 menjadi Rp 154,2 triliun. Sebagian besar dana ini digunakan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa dinikmati oleh pelajar SD hingga SMA. Alokasi anggaran juga dilakukan di bidang kesehatan dan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan subsidi



Oleh:
BAMBANG ARIYANTO, SH, MH*

BBM bukan berarti menghindari kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Subsidi di sektor lainnya masih tetap diperhatikan oleh pemerintah dalam bentuk yang lain. Bagi sebagian besar masyarakat, kenaikan BBM akan diiringi dengan kenaikan harga bahan bakar pokok. Dan itu benar adanya. Efek domino dari kenaikan BBM memang cukup besar. Lalu apakah tidak ada efek domino yang bersifat positif dan bisa dirasakan oleh masyarakat?

Dalam konteks ini yang perlu dilakukan adalah inovasi dan kreativitas.

Inovasi dan kreativitas itu bisa ditunjukkan dengan dimulainya sejumlah temuan di bidang energi alternatif untuk kendaraan bermotor. Di sejumlah kota seperti Yogyakarta, Surabaya, telah dirintis pembuatan mobil listrik. Di Situbondo, cairan dari buah kelapa bisa digunakan untuk menggantikan solar. Bahan bakar ini telah digunakan oleh masyarakat umum dan menjadi sumber energi bagi alat pertahanan-keamanan milik TNI. Di Sulawesi, seorang anak neger dari Desa Pakuure Kecamatan Tengkubung Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, berhasil menemukan pengganti BBM dari air nira. Bahan bakar ini bisa menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor masak dan bensin untuk menggerakkan mesin.

Justru, dengan temuan-temuan ini, masyarakat Indonesia harus optimis untuk menatap masa depan. Kenaikan BBM bukanlah akhir dari segalanya. Yang kita butuhkan adalah inovasi dan kreatifitas untuk menghadapi persoalan tersebut sehingga memunculkan alternatif yang bisa menjadi solusi. (*)

Penulis adalah:
Wakil Ketua
Formacida dan Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Hang
Tuah (UHT)

Menteri BUMN Kunjungi PP Daarul Muttaqien

SURABAYA—Mendapat kunjungan tamu istimewa Menteri BUMN Dahlan Iskan dimanfaatkan betul oleh KH Achmad Shofwan, pengasuh Pondok Pesantren Daarul Muttaqien, untuk banyak berbincang, Minggu (16/6) sore. Kepada Dahlan, Kyai Shofwan menceritakan tentang bagaimana sulitnya ia membangun masjid di pesantrennya yang berlokasi di Manukan Tandes.

Dalam prosesnya, kesulitan-kesulitan timbul. Saat bangunan tiga lantai sudah selesai, dan tinggal menyelesaikan bangunan kubah, tiba-tiba ia dilema karena harus berangkat naik haji selama 40 hari lamanya. Tukang-tukang sambat kepadanya jika kubah tidak dibangun maka akan merusak bagian bangunan yang lain karena kala itu sedang musim hujan. "Tapi saya sudah tidak punya uang," katanya.

Maka satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan hartanya untuk kepentingan pembangunan. Kebetulan harta itu adalah sebuah mobil Mazda yang menjadi 'kereta' utamanya untuk menjalankan dakwah kesana-kemari. Demi kubah, akhirnya lepas juga mobil itu untuk membangun kubah.

Sepulang haji, otomatis Kyai Shofwan tak punya kendaraan untuk mobilisasinya berdakwah. Dipilihlah taksi sehingga setiap kali ia pergi berdakwah. Kebiasaan ini diketahui salah satu jemaahnya. "Tanpa saya nyana



SILATURAHIM: Menteri BUMN Dahlan Iskan berbincang dengan KH Achmad Shofwan di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien.

jemaah itu membelikan saya mobil sedan baru. Kubah jadi, mobil baru didapat," katanya.

Semua itu diceritakan Kyai Shofwan kepada Dahlan sambil

mengobrol gayeng sehabis berjemaah Ashar kemarin sore. Dahlan mestinya hadir di pesantren tersebut Minggu pagi kemarin saat acara milad

pesantren tersebut. Namun baru hadir pada sore harinya karena Dahlan masih melakukan banyak agendanya sebagai Menteri BUMN. (het)

FENOMENA

Intensif Periksa Berkas Luar Kota

HARI pertama pendaftaran PPDB sekolah kawasan, sebagian besar yang muncul di permukaan adalah persoalan siswa dari luar Kota Surabaya. Wali murid non-Kota Surabaya, masih sering menanyakan tentang persyaratan dan kuota pagu satu persen yang diberlakukan Kota Surabaya.

Di SMAN 16 Surabaya, para wali murid menanyakan tentang ketentuan yang jelas. Selain itu, mereka juga menanyakan berbagai persyaratan dan berkas yang harus dibawa untuk verifikasi. "Secara keseluruhan, yang banyak bertanya adalah wali murid dari luar Kota Surabaya. Selain itu, juga verifikasi mutasi," terang Kasek SMAN 16 Surabaya, Sudarminto, kemarin.

Menurut Sudarminto, salah satu yang ditanyakan adalah tentang batasan kartu keluarga (KK) yang dibatasi per Januari



ONLINE: Pendaftaran siswa baru melalui website PPDBsurabaya.net.

2012 yang lalu. Bagi siswa yang ikut KK keluarganya di Kota Surabaya lebih dari batas waktu tersebut, tetap dianggap sebagai luar kota, dan kena pagu satu

persen. "Sebenarnya tetap saja boleh daftar, tetapi kena pagu luar kota," terang Sudarminto.

Yang jelas, kata Sudarminto, untuk pendaftar dari luar Kota

Surabaya, pihaknya melakukan verifikasi secara lebih detail. Sebab, bila tidak cocok, maka akan susah masuk ke sistem. Ini berbeda dengan siswa dalam kota Surabaya, yang databasenya sudah terdapat di server.

Untuk PPDB kali ini, Sudarminto menyiapkan sekitar 4-5 komputer. Jika jumlah pendaftar makin banyak, maka pihaknya menambah layanan lagi. "Kami juga memberi konsultasi ke masyarakat. Sebab, ada juga yang salah memasukkan nilai akhir (NA). Padahal, yang dipakai kan nilai unas," tuturnya.

Agar tidak terjadi banyak orang yang terlalu lama menunggu dan jenuh, pihaknya berusaha memberikan layanan yang nyaman. Wali murid yang datang diberi tempat duduk dan kursi yang nyaman. "Ya semangat. Kita itu kan memang melayani masyarakat," tukasnya. (nin/nis/no)

Pendaftaran Siswa Baru SMP Lebih Banyak

ANAK TENANG-TENANG,...

"Saya akan langsung ke sekolah yang dituju saja besok (hari ini, red)," kata wali murid lainnya Asmawati, yang bakal mendaftarkan anaknya ke SMPN 19 Surabaya.

Humas PPDB Kota Surabaya, Eko Prasetyoningsih mengungkapkan, jumlah pendaftar di sekolah kawasan untuk tingkat SMP masih lebih banyak dibanding tingkat SMA. Ini terjadi karena untuk pendaftaran di tingkat SMP, siswa lulusan SD yang mendaftarkan kebanyakan orang tuanya. Sementara untuk yang lulusan SMP masih memperhitungkan berbagai kemungkinan, misalnya mengenai persaingan.

Hingga pukul 18.00, pendaftar SMP kawasan mencapai 4.063 orang. Angka tersebut terus bergerak tiap detik. Sedangkan un-

tuk pendaftar SMA kawasan mencapai 2.426 peserta. "Memang untuk yang mendaftari jalur SMA kawasan, siswanya kebanyakan masih melakukan perhitungan, sehingga pendaftarannya masih kalah dibanding yang SMP kawasan," kata Eko, kemarin.

Eko menambahkan, sejak jalur sekolah kawasan dibuka, semua sekolah yang termasuk ke dalam sekolah kawasan siap membantu melakukan pendaftaran. Selain itu, di sekretariat PPDB Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya juga ada tim yang siap membantu bila ada calon pendaftar yang mengalami kesulitan. "Kami akan berusaha sebisa mungkin dan seoptimal mungkin pada PPDB kali ini," terangnya.

Sementara itu, SMP Negeri 22 yang merupakan salah satu SMP kawasan juga menyiapkan tim dan ruangan khusus pada

pendaftaran PPDB. Kasek SMP Negeri 22 Mochamad Hari mengatakan, siswa yang berada di wilayah sekitar sekolahnya bisa memanfaatkan fasilitas pendaftaran PPDB di sekolahnya. Pihaknya pun menyiapkan tim dari guru yang bisa membantu. "Meskipun ini hari Minggu, sekolah kami akan tetap buka untuk melayani para siswa yang hendak mendaftar. Bukan hanya untuk SMP, siswa yang ingin mendaftar di SMA kawasan juga bisa melakukannya di sekolah kami," terangnya.

Dia menyatakan, pendaftaran PPDB yang menggunakan sistem online memungkinkan para siswa untuk mendaftar di mana saja selama ada jaringan internet. "Jadi, tak masalah bila ada yang ingin daftar ke SMA tapi menggunakan jaringan internet di sekolah lain yang siap membantu," terangnya.

Seperti diketahui, untuk pendaftaran sekolah kawasan di jenjang SMP dan SMA di Kota Surabaya dibuka hingga tanggal 19 Juni 2013 pukul 16.00. Untuk masuk ke jenjang tersebut, para calon siswa harus memenuhi sejumlah kriteria yang ketat.

Siswa bersangkutan juga harus memiliki nilai rata-rata minimal 8,5 untuk SMP kawasan dan 8,0 untuk SMA kawasan. Serta nilai per mata pelajaran tidak boleh kurang dari 7,5 untuk SMP kawasan dan 7,25 untuk SMA kawasan. Siswa yang memenuhi standar nilai ini diharuskan mengikuti tes potensi akademik (TPA) yang digelar tanggal 22 Juni 2013 untuk SMP dan 23 Juni 2013 untuk SMA. Sedangkan khusus siswa luar kota, maka mereka harus berasal dari sekolah eks RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). (* /nis/no)